



## Prinsip Prinsip Ekonomi Islam

### *Principles of Islamic Economics*

Sahdiah Desriana Karim<sup>1</sup>, Rahmawati Muin<sup>2</sup>, Muslimin Kara<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [sahdiahdesrianakarim@gmail.com](mailto:sahdiahdesrianakarim@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id](mailto:rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [muslimin.kara@gmail.com](mailto:muslimin.kara@gmail.com)<sup>3</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 22-12-2025

Revised : 24-12-2025

Accepted : 26-12-2025

Published : 28-12-2025

#### Abstract

*Islamic economics is an economic system based on the values of the Quran and Hadith, aiming to achieve justice, balance, and social welfare. This article aims to examine the basic principles of Islamic economics and compare them with capitalist and socialist economic systems. The method used is library research, analyzing various relevant literature related to the concepts, principles, and application of Islamic economics. The results of the study indicate that Islamic economics is based on the principles of monotheism, justice, ownership, balance, maslahah (benefit), and morality. The principle of monotheism affirms that all wealth is a trust from Allah SWT, while the principle of justice emphasizes the equitable distribution of wealth and the prohibition of riba (usury), gharar (unlawful activity), and maisir (gambling). Ownership in Islam is recognized both individually and collectively, with social responsibility through the mechanisms of zakat (alms), infaq (infaq), and sadaqah (charity). Compared to capitalism, which focuses on individual ownership and profit, and socialism, which emphasizes collective ownership and state control, Islamic economics offers a system that balances the interests of the individual and society. Thus, Islamic economics becomes an alternative economic system based on moral and spiritual values to achieve prosperity in this world and the hereafter.*

**Keywords:** *Islamic economics, monotheism, justice*

---

#### Abstrak

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis yang bertujuan mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam serta membandingkannya dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis berbagai literatur yang relevan terkait konsep, prinsip, dan penerapan ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam didasarkan pada prinsip tauhid, keadilan, kepemilikan, keseimbangan, maslahah, dan akhlak. Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh harta merupakan amanah dari Allah SWT, sedangkan prinsip keadilan menekankan pemerataan distribusi kekayaan dan larangan praktik riba, gharar, dan maisir. Kepemilikan dalam Islam diakui secara individu maupun kolektif dengan tanggung jawab sosial melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah. Dibandingkan dengan kapitalisme yang berorientasi pada kepemilikan individu dan keuntungan, serta sosialisme yang menekankan kepemilikan kolektif dan kontrol negara, ekonomi Islam menawarkan sistem yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam menjadi alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan nilai moral dan spiritual untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

**Kata kunci:** *ekonomi Islam, tauhid, keadilan*



## **PENDAHULUAN**

Ekonomi Islam memiliki akar sejarah yang panjang dan kaya, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim sepanjang sejarah, dengan tujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.(Satria et al., 2024).

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian pula dunia Islam lainnya menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai dan prinsip syariah (Islamic economic system) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan Allah SWT.(Abu Bakar, 2020).

Islam sebagai agama yang bersifat universal dan komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya dalam hal ibadah ritual tetapi juga dalam urusan muamalah seperti sosial politik, budaya, hukum, dan ekonomi. Kesempurnaan ajaran Islam ini menunjukkan bahwa Islam dapat diterapkan kapanpun dan di mana pun hingga akhir zaman.(Fadhila et al., 2025)

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam serta perbandingannya dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep, nilai, serta karakteristik ekonomi Islam sebagaimana yang terdapat dalam sumber-sumber ilmiah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen resmi yang membahas ekonomi Islam, sistem ekonomi konvensional, serta nilai dasar kepemilikan dalam Islam. Sumber data terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari karya ilmiah para pakar dan akademisi di bidang ekonomi Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Dasar Ekonomi Islam**

Dasar-dasar ekonomi Islam mencakup prinsip tauhid (menjadikan Allah sebagai pemilik mutlak), keadilan (adil dalam bertransaksi dan mendistribusikan kekayaan), kepemilikan (diakui hak milik pribadi tapi tetap di bawah kendali Allah), dan keseimbangan (kegiatan ekonomi yang tidak mengabaikan urusan akhirat atau kepentingan orang lain).(Alam et al., 2024).

Konsep tauhid dalam Islam menekankan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah, dan manusia adalah khalifah (pengelola) yang bertanggung jawab atas aset dan sumber daya yang diberikan kepada mereka. (Rahmah, 2020) Oleh karena itu, pemahaman ini menekankan pentingnya menjalankan kegiatan ekonomi dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan keberpihakan kepada kepentingan umum. Tauhid dalam ekonomi Islam memiliki beberapa aspek penting:

1. Pengakuan terhadap Allah sebagai satu-satunya pencipta dan pemilik segala sesuatu: Dalam ekonomi Islam, Allah SWT dianggap sebagai satu-satunya pencipta dan pemilik segala sesuatu, termasuk sumber daya ekonomi.



2. Pengakuan terhadap kekuasaan dan wewenang Allah: Tauhid dalam ekonomi Islam juga berarti pengakuan terhadap kekuasaan dan wewenang Allah SWT dalam mengatur segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.
3. Penerapan syariah dalam kegiatan ekonomi: Tauhid dalam ekonomi Islam berarti penerapan syariah dalam kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi dapat sesuai dengan nilai-nilai Islam.
4. Implikasi tauhid dalam ekonomi Islam antara lain:
5. Kewajiban untuk menggunakan sumber daya ekonomi secara bertanggung jawab: Dalam ekonomi Islam, manusia memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber daya ekonomi secara bertanggung jawab dan tidak boros.
6. Larangan terhadap penumpukan kekayaan: Tauhid dalam ekonomi Islam juga berarti larangan terhadap penumpukan kekayaan yang tidak produktif dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
7. Pentingnya keadilan dan kesetaraan: Tauhid dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan.
8. Konsep keadilan dalam ekonomi Islam berarti memberikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya, serta memperlakukan semua orang dengan adil dan tidak memihak. Konsep keadilan dasar ekonomi Islam adalah terciptanya keseimbangan dan pemerataan dalam distribusi kekayaan, transaksi, dan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan bersama.(Permana & Nisa, 2024).

### **Prinsip-prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam**

Dalam ekonomi islam, ada beberapa prinsip keadilan yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Keadilan dalam Distribusi Kekayaan: Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan, sehingga tidak ada kesenjangan yang terlalu besar antara kaya dan miskin.
2. Keadilan dalam Transaksi Ekonomi: Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi, sehingga semua transaksi ekonomi harus dilakukan dengan transparan, jujur, dan tidak menipu.
3. Keadilan dalam Kesempatan: Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam kesempatan, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan dan meningkatkan taraf hidupnya.

### **Implikasi Keadilan dalam Ekonomi Islam**

1. Penghapusan Riba: Ekonomi Islam melarang riba, karena riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan.
2. Pemberian Zakat: Ekonomi Islam mewajibkan pemberian zakat, sebagai bentuk kepedulian sosial dan redistribusi kekayaan.
3. Pengawasan terhadap Monopoli: Ekonomi Islam melarang monopoli, karena monopoli dapat menyebabkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat.



## **Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam**

Berlandaskan pada pandangan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segalanya, sementara manusia adalah amanah atau khalifah untuk mengelola harta. Kepemilikan individu diakui dan diperbolehkan, namun dibatasi oleh syariat dan memiliki tanggung jawab sosial untuk kemaslahatan bersama melalui mekanisme seperti zakat dan larangan riba, serta ada kepemilikan umum untuk kepentingan publik.(Pratama et al., 2023)

### **Prinsip Utama Konsep Kepemilikan**

1. Kepemilikan adalah titipan Allah: Semua sumber daya adalah milik Allah, dan manusia diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkannya sebagai amanah.
2. Tidak ada kepemilikan absolut: Tidak ada kepemilikan yang bersifat mutlak dan eksklusif tanpa tanggung jawab. Hak milik selalu ada batasannya yang sesuai dengan syariat.
3. Keseimbangan antara hak individu dan sosial: Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial untuk keadilan dan kesejahteraan umum, serta distribusi kekayaan yang merata.
4. Pembatasan memperoleh harta: Kepemilikan dibatasi dengan cara-cara yang halal. Islam melarang cara- cara haram seperti riba, tetapi tidak membatasi jumlah harta yang diperoleh selama diperoleh secara sah.

Konsep keseimbangan dasar ekonomi Islam adalah keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, yang dicapai melalui keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini diwujudkan dengan menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan, menghindari praktik seperti riba dan kecurangan, serta memastikan sumber daya dimanfaatkan secara bijak untuk kemaslahatan bersama.(Saragih et al., 2025)

Berikut adalah beberapa aspek keseimbangan dalam ekonomi Islam:

1. Keseimbangan antara individu dan masyarakat: Ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Individu memiliki hak untuk memiliki harta dan meningkatkan taraf hidupnya, namun juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan masyarakat.
2. Keseimbangan antara kekayaan dan kemiskinan: Ekonomi Islam bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang dalam hal distribusi kekayaan.
3. Keseimbangan antara produksi dan konsumsi: Ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara produksi dan konsumsi, sehingga tidak terjadi kelebihan produksi atau kekurangan konsumsi.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban: Ekonomi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dan masyarakat, sehingga setiap orang dapat menikmati hak-haknya dan memenuhi kewajibannya.



Untuk mencapai keseimbangan dalam ekonomi Islam, beberapa instrumen dapat digunakan, seperti:

1. Zakat: Pemberian sebagian harta kepada yang berhak, untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin.
2. Sedekah: Pemberian harta kepada yang membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian sosial.

### **Prinsip-prinsip Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam didasarkan pada tiga prinsip utama: Tauhid, syariah, dan akhlak. Ketiganya menjadi dasar dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai ajaran Islam. Tauhid, merupakan dasar keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, termasuk harta yang dikelola manusia sebagai amanah. Ekonomi Islam bersumber dari Allah, dijalankan sesuai syariah, dan bertujuan untuk mendapatkan ridha-Nya.

Maslahah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat dengan menjaga lima kebutuhan pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maslahah menjadi landasan dalam menghadapi persoalan sosial, ekonomi, dan politik secara syar'i. Keadilan, prinsip ini menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan sosial ekonomi. Dalam Islam, keadilan berarti bersikap lurus, tidak berpihak, dan menjunjung kesetaraan hak bagi manusia. Akhlak, moral dan etika Islam seperti kejujuran, amanah, tolong-menolong, dan kesabaran wajib diterapkan dalam setiap aktivitas ekonomi karena bagian dari ibadah muamalah.

Dengan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem yang adil, bermoral, dan bermanfaat bagi semua pihak.

### **Perbandingan Ekonomi Islam, Kapitalis Dan Sosialis**

Perbedaan utama terletak pada kepemilikan, kebebasan ekonomi, dan tujuan utama. Ekonomi Islam menganut kepemilikan pribadi dan umum dengan landasan syariat, memberikan kebebasan sesuai aturan halal-haram, dan menyeimbangkan kepentingan individu serta sosial. Ekonomi kapitalis berfokus pada kepemilikan pribadi dan kebebasan pasar tanpa campur tangan pemerintah yang besar. Ekonomi sosialis mengutamakan kepemilikan kolektif/ negara dan mengontrol kegiatan ekonomi untuk mencapai kesetaraan yang lebih merata.

### **Sistem Ekonomi Islam**

Secara umum sistem ekonomi Islam didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada prinsip dan aturan yang berasal dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam ini ialah ajaran yang luas dan menyeluruh dan dinyatakan langsung oleh Allah SWT dan merupakan suatu ajaran yang sempurna. (Aini et al., 2025)

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad para ulama. Tujuannya adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial dengan melarang riba (bunga) serta menekan aktivitas yang mengandung kezaliman dan spekulasi, seperti maisir (judi) dan gharar (ketidakpastian). Sistem ini menekankan kepemilikan harta sebagai amanah, mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, dan mendorong investasi yang produktif dan bertanggung jawab secara sosial.



## **Prinsip Utama Sistem Ekonomi Islam**

1. Larangan praktik yang merugikan: Dilarang keras melakukan riba (bunga), gharar (transaksi yang mengandung ketidakpastian), maisir (judi), dan kegiatan yang menipu atau zalim.
2. Kepemilikan sebagai amanah: Menekankan bahwa seluruh kekayaan adalah milik Allah, dan manusia hanya diberi amanah untuk mengelolanya.
3. Keadilan dan keseimbangan: Bertujuan untuk menciptakan keadilan yang merata, keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial, serta pemerataan kekayaan.
4. Distribusi kekayaan: Menggunakan instrumen seperti zakat untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan mampu kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.
5. Fokus pada sektor riil: Mendorong investasi yang produktif dan langsung terkait dengan sektor riil, bukan spekulasi finansial semata.
6. Etika dan moralitas: Ekonomi Islam berlandaskan etika dan moralitas yang bersumber dari nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

## **Sistem Ekonomi Kapitalisme**

Sistem kapitalis memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Individu bisa dipandang memiliki hak untuk monopoli sarana produksi sesuai kemampuannya. Sistem ini mendistribusikan hartanya hanya pada bidang yang memiliki nilai guna materi. (Jan, n.d.)

Kapitalisme sering dianggap sebagai sistem ekonomi di mana pelaku swasta memiliki dan mengendalikan properti sesuai dengan kepentingan mereka, dan penawaran dan permintaan secara bebas menentukan harga di pasar dengan cara yang melayani kepentingan terbaik masyarakat. Oleh karena itu sistem ekonomi kapitalis ini merupakan sistem ekonomi yang aset-aset kepemilikan yang produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki dan dikelola oleh sektor individu atau swasta. Dalam sistem ekonomi kapitalis, modal menjadi suatu sumber produksi dan sumber kebebasan, individu-individu yang memiliki modal yang lebih besar akan menikmati hak kebebasan yang lebih baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. (Amri, 2017)

Contoh konkret dapat dilihat dalam kasus Amazon, yang menghadapi kritik terkait praktik monopolinya dan perlakuan terhadap pekerja. Meskipun perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan dan inovasi yang cepat, Amazon dituduh mengeksploitasi tenaga kerja dengan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak memadai, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak negatif dari kapitalisme yang tidak terkelola terhadap hak-hak pekerja. Selain itu, dominasi Amazon di pasar e-commerce menimbulkan isu terkait antitrust, karena perusahaan ini dituduh menghalangi persaingan dan merugikan bisnis kecil.

Ekonomi Kapitalisme dibangun di atas beberapa landasan, sebagai berikut:

1. kepemilikan pribadi, yang memungkinkan orang untuk memiliki aset berwujud seperti tanah dan rumah dan aset tidak berwujud seperti saham, obligasi, reksa dana;





2. kepentingan pribadi, di mana orang bertindak untuk kebaikan mereka sendiri, terlepas dari tekanan sosial, tanpa empati, kepedulian terhadap masyarakat.
3. persaingan bebas, melalui kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar saham, investasi di bidang apapun;
4. mekanisme pasar yang menetapkan harga secara desentralisasi melalui interaksi antara pembeli dan penjual harga, sebagai gantinya, mengalokasikan sumber daya, yang secara alami mencari imbalan tertinggi, tidak hanya untuk barang dan jasa tetapi juga untuk upah;
5. kebebasan untuk memilih sehubungan dengan konsumsi, produksi, dan investasi pelanggan yang tidak puas dapat membeli produk yang berbeda, investor dapat mengejar usaha yang lebih menguntungkan, pekerja dapat meninggalkan pekerjaan mereka untuk mendapatkan gaji yang lebih baik;
6. Peran pemerintah yang terbatas, untuk melindungi hak-hak warga negara dan memelihara lingkungan yang tertib yang memfasilitasi berfungsinya pasar dengan baik.

### **Sistem Ekonomi Sosialis**

Sosialisme adalah teori politik dan ekonomi yang mendukung kepemilikan serta pengelolaan sarana produksi dan distribusi barang dan jasa oleh masyarakat secara kolektif atau oleh pemerintah. Tujuan sosialisme adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dengan mengurangi kesenjangan pendapatan dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua individu. Ideologi ini telah berpengaruh dalam pembentukan berbagai program kesejahteraan sosial dan kebijakan di seluruh dunia, terutama di Eropa dan sebagian Amerika Latin. Sosialisme juga menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas di antara anggota masyarakat, berbeda dengan persaingan dan individualisme.

Ideologi ini mengutamakan kesejahteraan komunitas sebagai fokus utama, bukan hanya kepentingan sekelompok individu kaya. (Anggreini et al., n.d.) Dengan memprioritaskan kebutuhan kelas pekerja dan menerapkan kebijakan yang mendorong kesetaraan, sosialisme berupaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif untuk semua.

### **Nilai Dasar Kepemilikan Dalam Islam**

Pengertian Kepemilikan dalam Islam "Kepemilikan" sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari akar kata "malaka" yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab "milk" berarti kekuasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum. Dimensi kekuasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halangnya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya itu. Contohnya Ahmad memiliki sepeda motor. Ini berarti bahwa sepeda motor itu dalam kekuasaan dan genggamannya Ahmad. Dia bebas untuk memanfaatkannya dan orang lain tidak boleh menghalanginya dan merintanginya dalam menikmati sepeda motornya. (Permatasari & Usan, n.d.)

Nilai dasar kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan sebagai amanah dari Allah yang tidak mutlak, melainkan harus dikelola sesuai syariat dengan keseimbangan antara hak individu dan



kesejahteraan sosial. Islam mengakui kepemilikan pribadi, namun dengan batasan dan tanggung jawab, seperti zakat, infak, sedekah, serta larangan riba dan penimbunan harta untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Prinsip utama kepemilikan dalam Islam:

1. Kepemilikan adalah amanah: Harta adalah titipan dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya, bukan milik mutlak manusia.
2. Keseimbangan antara hak individu dan sosial: Kepemilikan individu diakui, tetapi penggunaannya dibatasi oleh aturan syariat dan tidak boleh merugikan orang lain demi kesejahteraan bersama.
3. Dasar syariat: Kepemilikan dianggap sah jika didasarkan pada izin dari Allah SWT melalui syariat, bukan semata-mata berdasarkan kepemilikan benda itu sendiri.
4. Tujuan yang mulia: Harta harus dimanfaatkan untuk kebaikan hidup, baik secara material, moral, maupun spiritual, serta disalurkan di jalan yang diridai Allah.
5. Mekanisme distribusi kekayaan: Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, sedekah, dan larangan riba untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

Dalam Islam, kepemilikan memiliki nilai dasar yang unik dan berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Kepemilikan dalam Islam didasarkan pada prinsip bahwa Allah SWT adalah pemilik sejati atas segala sesuatu, termasuk harta dan sumber daya alam. Manusia hanya sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya tersebut.

Kepemilikan individu dalam Islam diakui, namun dengan batasan-batasan tertentu. Individu yang memiliki harta dan sumber daya diwajibkan untuk menggunakan sebagian dari hartanya untuk kepentingan masyarakat, seperti membayar zakat dan sedekah. Islam juga melarang praktik monopoli dan penumpukan harta yang berlebihan, karena dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial.

## **KESIMPULAN**

Konsep dasar ekonomi Islam meliputi prinsip tauhid, keadilan, kepemilikan, zakat, mudharabah, dan keseimbangan. Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan, serta mengharamkan praktik riba, gharar, dan maisir. Sistem ekonomi ini juga mengakui hak kepemilikan individu dengan batasan-batasan tertentu untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Ekonomi Islam berbasis pada syariah Islam, menekankan keadilan sosial, dan mengharamkan praktik riba. Ekonomi ini mengakui hak kepemilikan individu dengan batasan tertentu dan menerapkan sistem zakat serta mudharabah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Ekonomi kapitalis berfokus pada kepemilikan individu dan persaingan bebas, dengan tujuan utama mencapai keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi ini memberikan kebebasan besar kepada individu dalam memiliki dan mengelola sumber daya.

Ekonomi sosialis menekankan kepemilikan kolektif dan kontrol pemerintah atas sumber daya ekonomi, dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial dan kesetaraan. Pemerintah memiliki peran aktif dalam mengatur kegiatan ekonomi untuk mencapai tujuan tersebut.





Dalam Islam, kepemilikan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk memiliki dan menikmati sumber daya alam. Dengan memahami nilai dasar kepemilikan dalam Islam, umat Muslim dapat mengelola harta dan sumber daya dengan cara yang sesuai dengan syariah dan mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Bakar, M. M. (2020). Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(2), 133–249.
- Aini, A. C., Amelia, D. M., Kirana, I. D., Saputri, M. A., Indriyani, P., & Hotman. (2025). Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional : Kelebihan dan Kekurangan. *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(2), 598–609.
- Alam, A. A. M. U., Arsyad, A., Pamungkas, C. A., Setiawan, D., Hidayat, R., Aditya, I., & Ar-raasyid, I. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga. *Journal Of Economis and Business*, 2(1), 34–42.
- Amri, H. (2017). Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalisme Dan Sosialisme Menurut Muhammad Sharif Chaudry Dalam Karyanya Fundamental Of Islamic Economic System. *ECONOMICA SHARIA*, 2(2).
- Anggreini, R. D., Rahmaddina, R., & Aisyah, R. (n.d.). Kegagalan Sistem Ekonomi Sosialis.
- Fadhila, A. F., Wahyuningsih, E., Rinaldi, N. C. A., Sulistiyowati, E., Susanti, S. T., & Syamilah. (2025). Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam dalam Perspetif IPTEKS. *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(1), 76–85.
- Jan, R. H. (n.d.). Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis Di Indonesia.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.
- Permatasari, E. F., & Usan. (n.d.). KONSEP KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Pratama, G., Yasin, M. M., Rokhmatulah, L., & Atikah, N. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Abu Yusuf Dalam Praktik Bisnis Dan Keuangan Modern. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 1975–1983.
- Rahmah, S. (2020). Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 164–177.
- Saragih, F. M., Prasetya, M. D. A., & Hasibuan, R. R. A. (2025). KONSEP KESEIMBANGAN PASAR DALAM EKONOMI MIKRO ISLAM: ANTARA TEORI DAN REALITA. *EKONOM : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 5(2), 38–43.
- Satria, A., Shifa, M., & Ariani, D. (2024). Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 53–59.